

# RENCANA KERJA 2020

**DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN**

Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan







**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
NOMOR: SK.9/PHP/TU/REN.0/12/2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana tentang Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
  8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1546);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TAHUN 2020.**

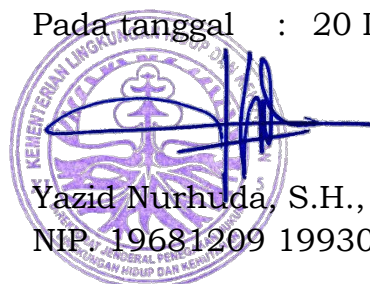
Kesatu : Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020.

Kedua : Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2019



Yazid Nurhuda, S.H., M.A

NIP. 19681209 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lampiran  
Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana  
Nomor SK.9/PHP/TU/REN.0/12/2019  
tentang  
Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana  
Tahun 2020

## Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2
Bab 2. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	4
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	4
1. Capaian Kinerja Tahun 2018	4
2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2019	6
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	7
1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018	7
2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2019	8
Bab 3. Rencana Kerja Tahun 2020	9
A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional	9
B. Program dan Kegiatan Tahun 2020	10
Bab 4. Penutup	15



## Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2018_____	4
Tabel 2. Tipologi kasus yang diselesaikan sampai dengan P21 pada tahun 2018_____	4
Tabel 3. Kegiatan yang dilakukan untuk indikator kinerja kegiatan jumlah peningkatan kapasitas PPNS_____	5
Tabel 4. Daftar sarana prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum pidana yang diperoleh tahun 2018_____	6
Tabel 5. Prognosis capaian kinerja tahun 2019_____	6
Tabel 6. Daftar sarana prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum pidana yang diperoleh tahun 2019_____	7
Tabel 7. Capaian serapan anggaran kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2018___	7
Tabel 8. Prognosis serapan anggaran kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2019_	8
Tabel 9. Target Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020_____	10
Tabel 10. Target Kinerja Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020__	11
Tabel 11. Komponen kegiatan penegakan hukum pidana _____	11
Tabel 12. Kerangka pendanaan tahun 2020_____	12
Tabel 13. Pagu anggaran per komponen kegiatan tahun 2020_____	12
Tabel 14. Rincian anggaran tahun 2020 berdasarkan sumber dana _____	13
Tabel 15. Rincian anggaran tahun 2020 berdasarkan jenis belanja _____	13
Tabel 16. Rencana pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2020 _____	13

## Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana _____	3
Gambar 2. Sumber daya manusia Direktorat Penegakan Hukum Pidana_____	3
Gambar 3. Kunjungan peserta diklat pembentukan PPNS ke Intelligence Center Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK _____	5
Gambar 4. Dukungan Kementerian LHK terhadap Prioritas Pembangunan Nasional_____	9
Gambar 5. Prioritas Pembangunan Nasional Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup_____	10

## Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, dan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Dokumen Renja yang merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat Penegakan Hukum Pidana untuk melaksanakan kegiatan terkait penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan adanya dokumen Renja ini diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan di Direktorat Penegakan Hukum Pidana dan penggunaan anggaran tetap terarah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Jakarta, Desember 2019

Direktur,



Yazid Nurhuda, S.H., M.A  
NIP. 19681209 1993 1 001

## Bab 1. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pesatnya pembangunan dan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung semakin konsumtif memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kebutuhan lahan dan bahan baku mendorong pembukaan lahan hutan dan eksploitasi sumber daya alam lainnya sehingga memberikan tekanan yang sangat hebat pada lingkungan hidup, sehingga menurunkan daya dukung lingkungan hidup kepada seluruh kehidupan yang ada di dalamnya.

Sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warganegara atas lingkungan hidup yang layak, Pemerintah menetapkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan adalah penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang tegas dan konsisten diharapkan dapat mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik.

### B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

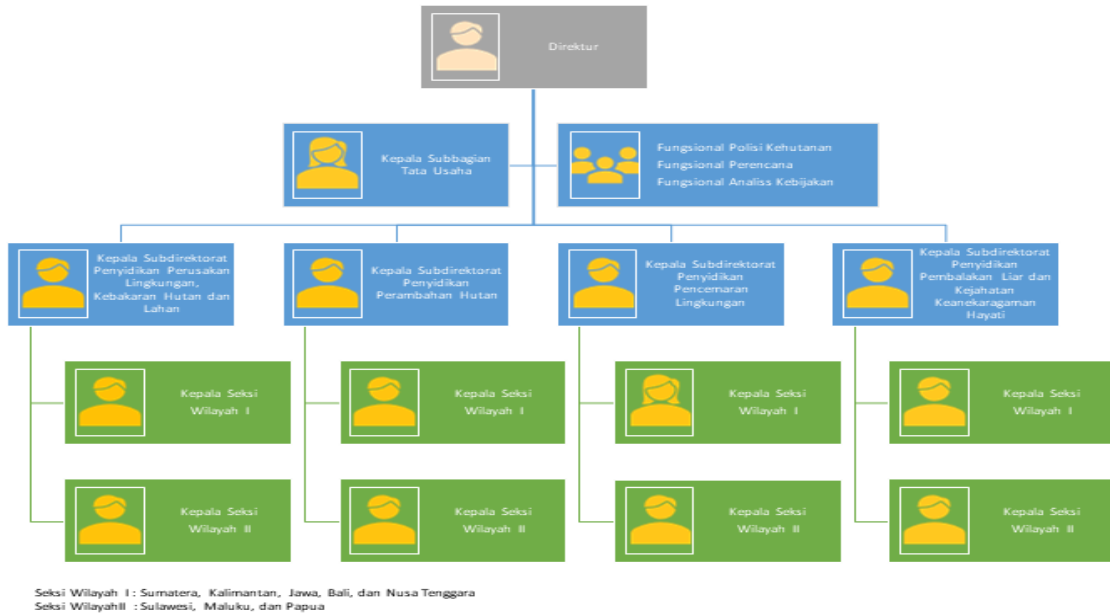
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penegakan Hukum Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan Kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan Kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan, dan lahan, perambahan Kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti, serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu di daerah; dan
6. pelaksanaan administrasi Direktorat.

### C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana didukung oleh 50 orang pegawai yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak. Struktur organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana



Gambar 2. Sumber daya manusia Direktorat Penegakan Hukum Pidana

## Bab 2. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

#### 1. Capaian Kinerja Tahun 2018

Capaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2018

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara profesional	Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa)	8 % dari 100 kasus (8 kasus)	7 kasus	87,50%
		Jumlah peningkatan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana PPNS	350 orang	326 orang	93,14%
2.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Layanan perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%

Berdasarkan tipologinya, kasus tindak pidana lingkungan hidup yang berhasil diselesaikan sampai dengan P21 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Tipologi kasus yang diselesaikan sampai dengan P21 pada tahun 2018

No	Tipologi Kasus	Jumlah Kasus
1.	Perusakan lingkungan hidup	1
2.	Pembakaran hutan dan lahan	1
3.	Perambahan hutan	1
4.	Pencemaran lingkungan hidup	2
5.	Pembalakan liar	2
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Pencapaian target indikator kinerja kegiatan kedua, yaitu jumlah peningkatan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana PPNS dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas PPNS, pembentukan PPNS dan pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum pidana.

Tabel 3. Kegiatan yang dilakukan untuk indikator kinerja kegiatan jumlah peningkatan kapasitas PPNS

Indikator Kinerja Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	Jumlah (orang)
Jumlah peningkatan kapasitas PPNS	1.	Peningkatan kapasitas PPNS (kumulatif)	266
	2.	Pembentukan PPNS	60
<b>Jumlah</b>			<b>326</b>



Gambar 3. Kunjungan peserta diklat pembentukan PPNS ke *Intelligence Center* Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK



Hasil pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Daftar sarana prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum pidana yang diperoleh tahun 2018

No	Kategori	Jenis Barang	Jumlah
1.	Kendaraan bermotor	Sepeda motor	2 unit
2.	Alat pengumpul dan pengolahan data	Desktop komputer	1 unit
		Laptop	10 unit
		Digital voice recorder	2 unit
		Document scanner	4 unit
		Printer portable	4 unit
3.	Peralatan perkantoran	Layar proyektor	1 unit
		Proyektor	2 unit
		Mesin penghancur kertas	2 unit

## 2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2019

Dengan memperhatikan kondisi di lapangan dan sumber daya manusia yang ada pada Direktorat Penegakan Hukum Pidana, prognosis capaian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Prognosis capaian kinerja tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Layanan dukungan manajemen satker	1 layanan	1 layanan	100%
		Layanan perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%
2.	Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	25 kasus	22 kasus	88%
		Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P21	1 kasus	1 kasus	100%
		Sarana prasarana penegakan hukum pidana LHK yang memenuhi standar minimum	1 lokasi	1 lokasi	100%

Tabel 6. Daftar sarana prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum pidana yang diperoleh tahun 2019

No	Kategori	Jenis Barang	Jumlah
1.	Alat pelindung diri	Sepatu keselamatan ( <i>safety shoes</i> )	60 pasang
2.	Peralatan dan mesin	Laptop	6 unit
		Drone	4 unit
		Telepon genggam untuk pengendali drone	4 unit
		Bor auger	2 set
		Digital voice recorder	2 buah
		Mesin penghitung uang	1 unit
		AC portabel	4 unit
		Exhaust fan	2 unit
3.	Kendaraan	Mobil tahanan	6 unit
4.	Mebelair	Rak besi	4 unit
		Credensa	2 unit
		Lemari kaca	1 unit

## B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

### 1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018

Serapan anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2018 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Capaian serapan anggaran kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2018

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa)	13.040.540.000	12.910.153.582	99
2.	Jumlah peningkatan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana PPNS	6.985.590.000	6.979.774.010	99,91
3.	Layanan perkantoran	871.000.000	869.401.782	99,81
	Rata-rata			99,34

## 2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2019

Prognosis serapan anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut.

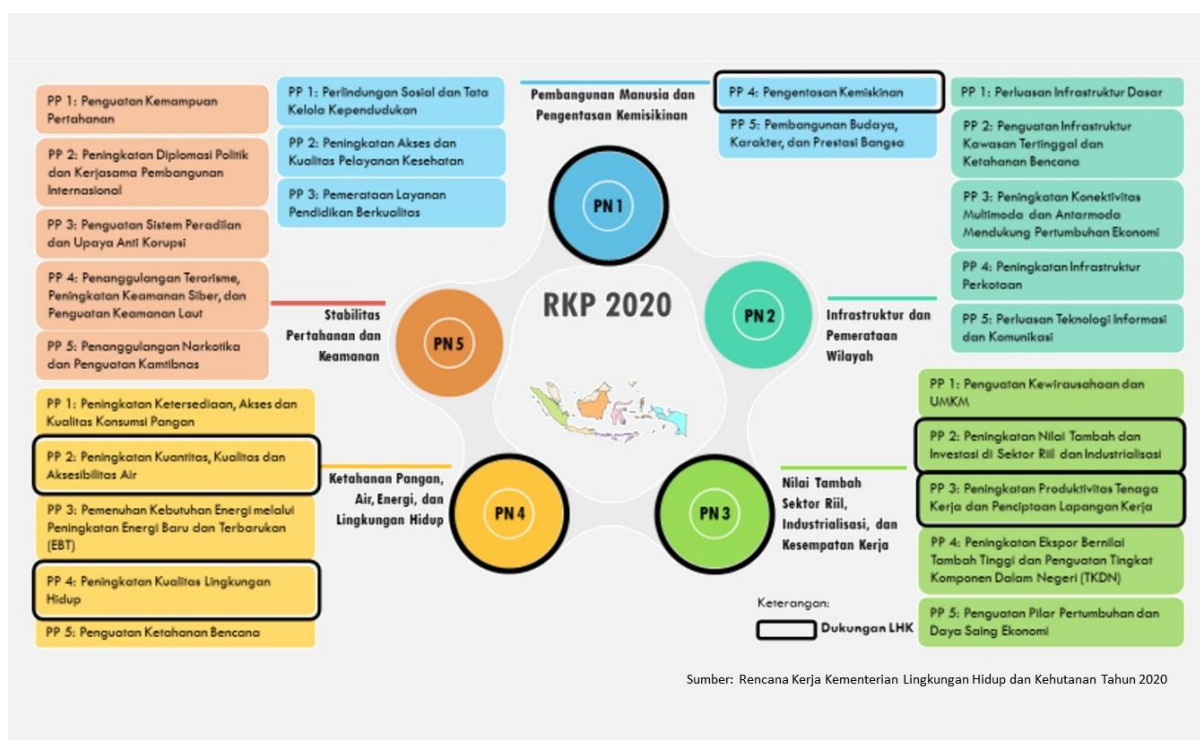
Tabel 8. Prognosis serapan anggaran kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Layanan dukungan manajemen satker	375.000.000	331.605.700	88,43
2.	Layanan perkantoran	1.719.779.000	1.703.460.670	99,05
3.	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	15.211.219.000	15.050.791.171	98,95
4.	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P21	500.000.000	363.387.700	72,68
5.	Sarana prasarana penegakan hukum pidana LHK yang memenuhi standar minimum	5.250.000.000	4.870.965.000	99,41

## Bab 3. Rencana Kerja Tahun 2020

### A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional

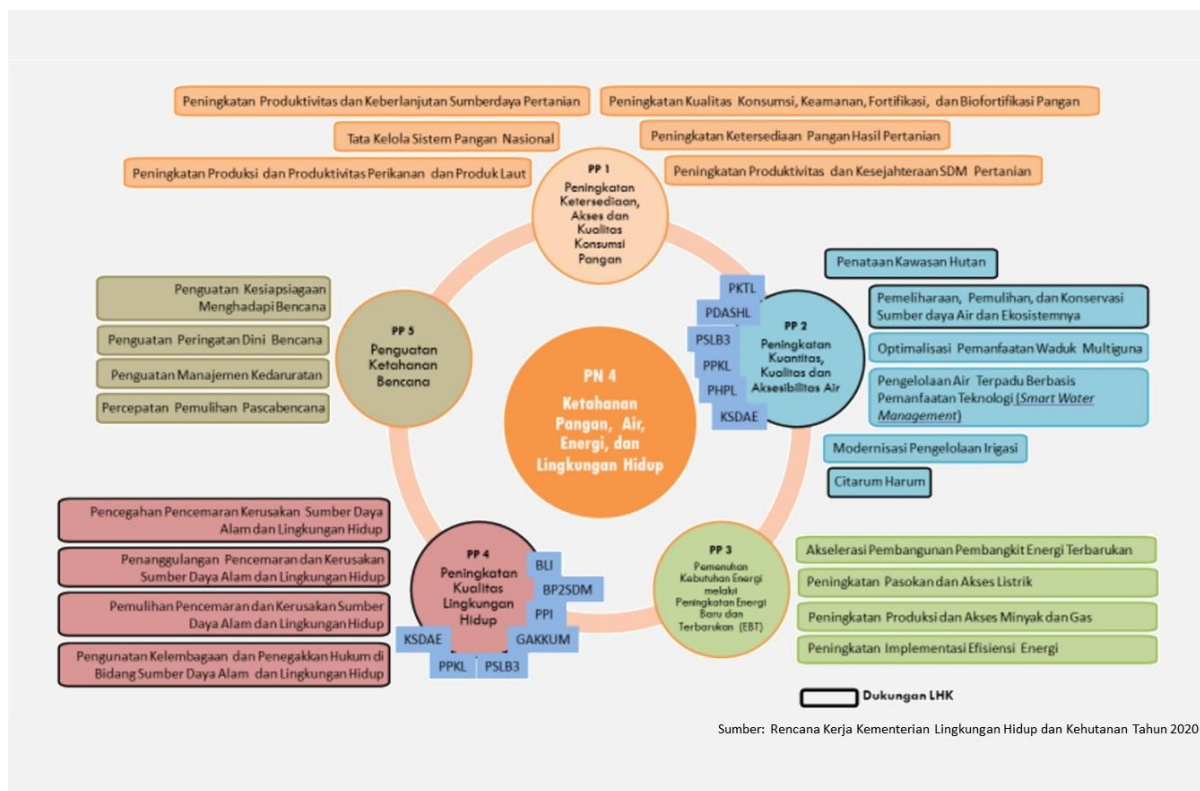
Pembangunan Nasional Tahun 2020 menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional.



Gambar 4. Dukungan Kementerian LHK terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Strategi Kementerian LHK dalam mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup adalah dengan penetapan dan perlindungan kawasan lindung, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan DAS, dan revitalisasi danau. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan kebakaran hutan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah, serta pemantauan kualitas air, air laut, dan udara. Strategi tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan yang salah satunya adalah kegiatan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.



Gambar 5. Prioritas Pembangunan Nasional Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

## B. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian LHK dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK tahun 2020, salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah melalui penyelesaian kasus tindak pidana LHK.

Tabel 9. Target Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
			Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Direktorat Penegakan Hukum Pidana	UPT Balai Gakkum (5 Balai)
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	10 layanan	1 Layanan	5 layanan

2	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kebutuhan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	200 orang	26 kasus	10 orang
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya		190 orang	

Tabel 10. Target Kinerja Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Prognosis Realisasi	Prognosis Capaian
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 layanan	100%
2.	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kebutuhan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	26 kasus	26 kasus	100%
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	190 orang	190 orang	100%

Rincian kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana sampai ke tingkat komponen adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Komponen kegiatan penegakan hukum pidana

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Output	Komponen
1.	Layanan Perkantoran	-	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2.	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK
		Kasus tindak pidana LHK di Wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P-21	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK di Wilayah DAS Citarum Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK di Wilayah DAS Citarum

<b>3.</b>	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	-	Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK
			Peningkatan Kapasitas PPNS LHK
			Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK
			Praperadilan Kasus Tindak Pidana LHK

Untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai target kinerja yang ditetapkan, kerangka pendanaan Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Kerangka pendanaan tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Pagu (Rp)
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.161.379.000
2.	Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	26 kasus	16.673.030.000
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	190 orang	10.426.250.000
<b>Total</b>				<b>28.260.659.000</b>

Tabel 13. Pagu anggaran per komponen kegiatan tahun 2020

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Output	Komponen	Pagu (Rp)
1.	Layanan Perkantoran		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.161.379.000
2.	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	5.671.500.00
			Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	10.102.030.000
		Kasus tindak pidana LHK di Wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P-21	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK di Wilayah DAS Citarum	316.000.000
			Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK di Wilayah DAS Citarum	495.500.000

3.	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK	1.488.750.000
		Peningkatan Kapasitas PPNS LHK	3.625.000.000
		Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	4.392.500.000
		Praperadilan Kasus Tindak Pidana LHK	920.000.000

Tabel 14. Rincian anggaran tahun 2020 berdasarkan sumber dana

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rupiah Murni (Rp)	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp)	Total (Rp)
1.	Layanan Perkantoran	1.161.379.000	-	1.161.379.000
2.	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	16.673.030.000	-	16.673.030.000
3.	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	6.719.345.000	3.706.905.000	10.426.250.000
<b>Total</b>		<b>24.533.754.000</b>	<b>3.706.905.000</b>	<b>28.260.659.000</b>

Tabel 15. Rincian anggaran tahun 2020 berdasarkan jenis belanja

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal Pajak (Rp)	Total (Rp)
1.	Layanan Perkantoran	1.161.379.000	-	1.161.379.000
2.	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	16.673.030.000	-	16.673.030.000
3.	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	7.401.888.000	3.024.362.000	10.426.250.000
<b>Total</b>		<b>25.236.297.000</b>	<b>3.024.362.000</b>	<b>28.260.659.000</b>

Untuk mendukung kegiatan penegakan hukum pidana, Direktorat Penegakan Hukum Pidana berencana untuk melakukan pengadaan sarana prasarana yang termasuk dalam kategori belanja modal sebagai berikut.

Tabel 16. Rencana pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan kegiatan penegakan hukum pidana tahun 2020

No	Kategori	Jenis Barang	Jumlah	Pagu (Rp)
1.	Meubelair	Lemari penyimpanan di ruang kerja Kasubdit	4 unit	160.000.000
		Lemari arsip (filling cabinet bergerak)	1 unit	65.000.000
2.		Laptop	2 unit	120.000.000



	Alat Pengumpul dan Pengolah Data	Portable multi parameter device	2 unit	30.000.000
		Portable mercury vapor analyzer	2 unit	751.730.000
		Portable digital soil test kit	6 unit	900.000.000
3.	Kendaraan bermotor	Kendaraan fungsional PPNS	3 unit	997.632.000

## Bab 4. Penutup

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020 diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana sekaligus sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian target prioritas pembangunan nasional.





**Direktorat Penegakan Hukum Pidana**  
**Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**